

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN
DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**PIPIN SULISTYA
011900273**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : PIPIN SULISTYA
NIM : 011900273
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN
INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH, M.Hum, CTL

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN INTELIJEN
KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR MUARA ENIM**

**Penulis,
Pipin Sulistya**

**Pembimbing Pertama:
Dr.H.FIRMAN FREADDY BUSROH,,SH.,MH.,CTL.
Pembimbing Kedua:
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum**

A B S T R A K

Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim adalah Bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok, atau perorangan, mendengar dan melihat gejala hingga keluhan-keluhan masyarakat dalam berbagai hal, seperti terjadinya transaksi narkoba, dan menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan, serta bertanggung jawab terhadap Kapolres Muara Enim dalam hal hasil penyelidikan dan penghambat Satuan Intelijen Kepolisian dalam dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Polres Muara Enim adalah sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap, Sumber Daya Manusia masih kurang sementara untuk menjalankan tugas fungsi intelijen diperlukan Sumber Daya Manusia yang lebih dan terbatasnya anggaran dana yang diberikan.

Rekomendasi Agar Kepolisian Polres Muara Enim menambah jumlah anggota dalam penanganan tindak pidana Narkotika sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan fungsi intelijen sementara jumlah SDM masih kurang dan diharapkan kepada Kepolisian Polres Muara Enim agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika terutama fungsi intelijen dalam pengungkapan tindak pidana Narkotika serta dapat berperan dengan baik.

Kata kunci: Intelijen Kepolisian, Tindak Pidana, Narkotika.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metodologi.....	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepolisian	12
B. Pengertian Tindak Pidana	20
C. Pengertian Narkoba.....	27
D. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	31
E. Tugas dan Wewenang Satuan Intelijen.....	36
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUARA ENIM	
A. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum	

Keputusan Rencan Mautu Enam	40
B. Faktor Penghambatan Satuan Intelijen Kepolisian dalam Jalani Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di wilayah Dakum	
Keputusan Rencan Mautu Enam	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Intelijen Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim adalah Bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, kelompok, atau perorangan, mendengar dan melihat gejala hingga keluhan-keluhan masyarakat dalam berbagai hal, seperti terjadinya transaksi narkoba, dan menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan, serta bertanggung jawab terhadap Kapolres Muara Enim dalam hal hasil penyelidikan.
2. Penghambat Satuan Intelijen Kepolisian dalam dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Polres Muara Enim adalah sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap, Sumber Daya Manusia masih kurang sementara untuk menjalankan tugas fungsi intelijen diperlukan Sumber Daya Manusia yang lebih dan terbatasnya anggaran dana yang diberikan.

B. Saran-saran

1. Agar Kepolisian Polres Muara Enim menambah jumlah anggota dalam penanganan tindak pidana Narkotika sehingga dapat ditangani dengan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005

-----, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1989

-----, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sianar Grafika, Jakarta, 2011

Budi Rizky Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1992

Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

-----, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987